

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KOTA MADIUN TAHUN 2010

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Madiun Tahun 2009-2014;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2010.

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis

Kota Madiun secara geografis memiliki luas wilayah 33,23 km² dan terletak pada koordinat 111⁰ sampai 112⁰ Bujur Timur dan 7⁰ sampai 8⁰ Lintang Selatan, yang secara administratif terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan.

Batas Administrasi Wilayah Kota Madiun :

- a. Sebelah utara : Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun ;
- b. Sebelah selatan : Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun ;
- c. Sebelah timur : Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun ;
- d. Sebelah barat : Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.

2. Kondisi Demografis

- a. Berdasarkan Penghitungan Badan Pusat Statistik Kota Madiun jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2010 mencapai 203.972 Jiwa yang terdiri dari 98.601 jiwa laki laki dan 105.371 jiwa Perempuan.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan di Kota Madiun Tahun 2010

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Manguharjo	30.353	31.877	62.230
2.	Taman	41.277	44.494	85.771
3.	Kartoharjo	26.971	29.000	55.971
Jumlah		98.601	105.371	203.972

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Madiun

- b. Sedangkan jumlah penduduk yang memiliki dokumen identitas kependudukan Kota Madiun berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Madiun berdasarkan hasil pemutakhiran data kependudukan melalui pencocokan dan penelitian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sampai dengan Akhir Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Kepala Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga per Kecamatan di Kota Madiun Tahun 2010

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga
1.	Manguharjo	19.355
2.	Taman	25.930
3.	Kartoharjo	17.114
Jumlah		62.399

Sumber Data : Dinas Dukcapil Kota Madiun

Tabel 3
Jumlah Penduduk Yang Memiliki Dokumen Identitas Kependudukan Menurut Kelompok Umur di Kota Madiun Berdasarkan Hasil Coklit Dinas Dukcapil Tahun 2010

No	Kelompok umur	Jumlah
1.	0 – 4 Tahun	9.145
2.	5 – 9 Tahun	14.074
3.	10 – 14 Tahun	14.420
4.	15 – 19 Tahun	14.132
5.	20 – 24 Tahun	13.381
6.	25 – 29 Tahun	17.298
7.	30 – 34 Tahun	18.679
8.	35 – 39 Tahun	17.583
9.	40 – 44 Tahun	16.265
10.	45 – 49 Tahun	14.361
11.	50 – 54 Tahun	13.139
12.	55 – 59 Tahun	10.719

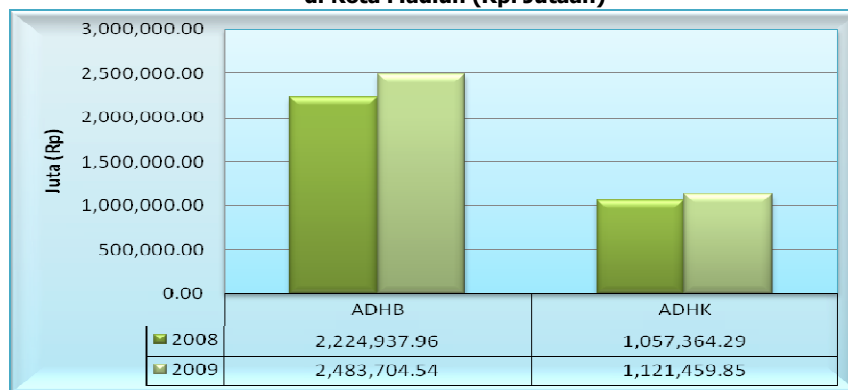
13.	60 Tahun ke atas	25.629
Jumlah		198.825

Sumber Data : Dinas Dukcapil Kota Madiun

3. Kondisi Ekonomi

- a. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun atas dasar harga berlaku tahun 2008 sebesar 2.224,94 milyar rupiah, sedangkan pada tahun 2009 mencapai 2.283,70 milyar rupiah. Berarti ada kenaikan 258,76 milyar rupiah atau mengalami kenaikan 11,63%.

Grafik 1
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
di Kota Madiun (Rp. Jutaan)



Sumber Data : PDRB Kota Madiun Tahun 2009

- b. PDRB atas dasar harga konstan, yang dihitung dengan menggunakan harga dasar tahun dasar 2000, angka PDRB pada tahun 2008 mencapai 1.057,36 Milyar Rupiah. Dan pada tahun 2009 mencapai 1.121,46 Milyar Rupiah. Ada sedikit penurunan pertumbuhan ekonomi Kota Madiun sebesar 0,16% dari 6,24 pada tahun 2008 menjadi 6,06 pada tahun 2009.

Tabel 4
Prosentase PDRB/ Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan

No	Sektor	Tahun 2008 (%)	Tahun 2009 (%)
1	Pertanian	1,76	4,67
2	Pertambangan dan penggalian	7,04	6,10
3	Industri Pengolahan	10,77	5,41
4	Listrik, Gas dan Air Minum	16,79	2,67
5	Bangunan/ Konstruksi	(10,46)	3,64
6	Perdagangan, Hotel dan restoran	4,82	5,84
7	Pengangkutan dan komunikasi	12,78	10,34
8	Keuangan, persewaan dan jasa persewaan	10,77	5,94
9	Jasa-jasa	6,29	6,04
	Pertumbuhan PDRB/ Pertumbuhan Ekonomi	6,24	6,06

Sumber Data : PDRB Kota Madiun Tahun 2009

- c. Pada tahun 2009 pendapatan per kapita penduduk Kota Madiun sebesar 13,85 juta rupiah per tahun atau sekitar 1.154 ribu rupiah per bulan, meningkat 13,42% per tahun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 12,48 juta rupiah per tahun atau sekitar 1.040 per bulan pada tahun 2008.
- d. Untuk Indeks daya beli masyarakat Kota Madiun pada tahun 2009 mencapai 270,58 jauh lebih tinggi dibanding tahun 2008 atau mengalami pertumbuhan sebesar 7,30%

Tabel 5
Indeks Daya Beli Kota Madiun Tahun 2008-2009

No.	Uraian	Tahun 2008	Tahun 2009
1	Indeks PDRB Per Kapita (ADHB)	295,30	327,62
2	Indeks Harga Konsumen (IHK)	117,09	121,08
3	Indeks Daya Beli (IDB)	252,18	270,58
4	Laju Pertumbuhan IDB (%)	0,13	7,30

Sumber Data : ASPM Kota Madiun Tahun 2009

II. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Visi dan Misi Kota Madiun

- VISI : Bekerja untuk Kemajuan Kota Madiun Sejahtera.
- MISI : 1. Mewujudkan pembangunan berbasis pada Partisipasi Masyarakat (Partisipatoris) ;
2. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan (*Good and Clean Governance*) melalui penegakan Pakta Integritas sebagai upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
3. Mewujudkan pelayanan public ;
4. Mewujudkan tatanan sosial yang dinamis.

B. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2010

1. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat ;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan ;
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan ;
4. Peningkatan Infrastruktur Khususnya Pengendalian Banjir dan Lingkungan Hidup.

III. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Realisasi penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2010 sebesar Rp.511.265.259.855,53 atau mencapai 107,49% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.475.632.126.000,00. Sedangkan penerimaan Pendapatan Daerah secara

keseluruhan pada tahun anggaran 2010 mengalami peningkatan mencapai 22,72%, yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp.416.592.459.385,97 menjadi Rp.511.265.259.855,53 pada tahun 2009.

Tabel 6
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2009-2010

No	Pendapatan	2009	2010
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	43,871,880,252.97	41,757,000,273.53
2.	Dana Perimbangan	334,527,412,777.00	328,825,756,106.00
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	38,193,166,356.00	140,682,503,476.00
	Jumlah	416,592,459,385.97	511,265,259,855.53

Sumber : DPPKAD Kota Madiun

B. Pengelolaan Belanja Daerah

Alokasi Belanja Daerah pada tahun anggaran 2010 sebesar Rp.560.088.313.000,00 atau mengalami kenaikan mencapai 29,99% dari tahun 2009 Rp.430.848.376.000,00. Alokasi Belanja Daerah tersebut, terdiri atas: Belanja Tidak Langsung mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp.322.132.533.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.237.955.780.000,00. Ini berarti bahwa Persentase Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap Alokasi Belanja secara keseluruhan masing-masing mencapai 57,51% dan 42,49%.

Tabel 7
Ringkasan Alokasi dan Realisasi Belanja Daerah Kota Madiun
Tahun Anggaran 2010

Uraian	Alokasi setelah PAK	Realisasi	Berlebih/ (kurang)	
			Rupiah	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	322.132.533.000,00	301.935.295.801,00	(20.197.237.199,00)	93,73
Belanja Pegawai	298.428.482.000,00	287.092.507.203,00	(11.335.974.797,00)	96,20
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	6.197.500.000,00	6.712.379.000,00	514.879.000,00	108,31
Belanja Bantuan Sosial	9.006.551.000,00	8.130.409.598,00	(876.141.402,00)	90,27
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
Belanja Tidak Terduga	8.500.000.000,00	-	(8.500.000.000,00)	-
BELANJA LANGSUNG	237.955.780.000,00	204.340.654.251,00	(33.615.125.749,00)	85,87
Belanja Pegawai	20.916.689.000,00	18.105.961.006,00	(2.869.736.994,00)	86,32
Belanja Barang dan Jasa	69.159.905.000,00	63.024.945.390,00	(6.086.630.610,00)	91,19
Belanja Modal	147.879.186.000,00	123.209.747.855,00	(24.658.758.145,00)	83,32
BELANJA DAERAH	560.088.313.000,00	506.275.950.052,00	(53.812.362.948,00)	90,39

Sumber Data : DPPKAD Kota Madiun

Tabel 8
Alokasi dan Realisasi Belanja SKPD
Kota Madiun Tahun Anggaran 2010

NO.	SKPD	URUSAN YANG DITANGANI	ALOKASI BELANJA SETELAH PERUBAHAN			REALISASI BELANJA	%
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH		
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	Pendidikan	200,743,022,000	26,696,840,000	227,439,862,000	215,469,123,590	94.74
		Kebudayaan					
		Kepemudaan dan Olah Raga					
2	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Perpustakaan	788,817,000	278,735,000	1,067,552,000	1,049,291,963	98.29
		Kearsipan					
3	Dinas Kesehatan	Kesehatan	11,515,387,000	16,516,604,000	28,031,991,000	26,425,710,834	94.27
4	RSUD Kota		5,195,753,000	22,340,287,000	27,536,040,000	24,489,762,993	88.94
5	Dinas Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	3,852,147,000	106,480,707,000	110,332,854,000	93,822,637,426	85.04
		Perumahan					
6	Badan Perencanaan Pembangunan	Perencanaan Pembangunan	1,703,692,000	2,683,908,000	4,387,600,000	4,344,244,660	99.01
		Tata Ruang					
		Statistik					
7	Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika	Perhubungan	4,589,565,000	1,770,942,000	6,360,507,000	6,091,278,777	95.77
		Komunikasi dan Informatika					
8	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Lingkungan Hidup	7,035,299,000	7,771,057,000	14,806,356,000	14,234,571,724	96.14
9	Kantor Lingkungan Hidup		894,299,000	1,754,163,000	2,648,462,000	2,545,151,922	96.10
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	1,533,292,000	1,184,620,000	2,717,912,000	2,641,947,052	97.21
11	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	Sosial	2,037,648,000	1,232,869,000	3,270,517,000	3,194,908,692	97.69
		Ketenagakerjaan					
12	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1,763,168,000	201,631,000	1,964,799,000	1,864,781,915	94.91
13	Satuan Polisi Pamong Praja		1,326,927,000	1,063,343,000	2,390,270,000	2,322,581,892	97.17
14	DPRD		4,462,806,000	-	4,462,806,000	4,250,274,105	95.24
15	Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah		489,931,000	-	489,931,000	488,190,584	99.64
16	Sekretariat DPRD		1,210,970,000	6,187,357,000	7,398,327,000	6,295,391,184	85.09
17	Inspektorat		1,534,790,000	613,765,000	2,148,555,000	2,154,365,531	100.27
18	Badan Kepegawaian Daerah		1,532,219,000	3,322,836,000	4,855,055,000	4,404,004,503	90.71
19	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	950,889,000	778,799,000	1,729,688,000	1,624,627,733	93.93	
20	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		35,257,933,000	10,745,589,000	46,003,522,000	30,516,619,967	66.34
21	Kecamatan Kartoharjo	Otonomi Daerah	5,160,644,000	1,875,934,000	7,036,578,000	6,740,076,557	95.79

		Pemberdayaan Masyarakat					
		Kepemudaan dan Olah Raga					
22	Kecamatan Taman	Otonomi Daerah	4,972,176,000	973,526,000	5,945,702,000	5,789,755,150	97.38
		Pemberdayaan Masyarakat					
23	Kecamatan Manguharjo	Otonomi Daerah	5,123,135,000	1,018,314,000	6,141,449,000	5,885,773,933	95.84
		Pemberdayaan Masyarakat					
24	Sekretariat Daerah	Otonomi Daerah	6,849,730,000	16,724,858,000	23,574,588,000	22,746,989,510	96.49
		Perencanaan Pembangunan Budaya					
		Kominfo					
		Kesehatan					
		Sosial					
		Kepemudaan dan Olah Raga					
		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					
		Ketahanan Pangan					
		Perdagangan					
25	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan	Pemberdayaan Masyarakat	3,161,899,000	1,878,704,000	5,040,603,000	4,805,613,629	95.34
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
		KB dan KS					
		Ketahanan Pangan					
26	Dinas Pertanian	Pertanian	1,821,937,000	1,863,815,000	3,685,752,000	3,371,074,022	91.46
		Perikanan					
27	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata	Perdagangan	2,044,706,000	946,002,000	2,990,708,000	3,272,015,219	109.41
		Perindustrian					
		Koperasi dan UKM					
		Pariwisata					
28	Dinas Pasar	Perdagangan	4,579,752,000	1,050,575,000	5,630,327,000	5,435,184,985	96.53
		Jumlah	322,132,533,000	237,955,780,000	560,088,313,000	506,275,950,052	90.39

Sumber Data : DPPKAD Kota Madiun

IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB

1. Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan urusan pendidikan di Kota Madiun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun dengan alokasi anggaran Belanja Langsung pada

Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.25.699.767.000,00 dan terealisasi Rp.18.252.193.512,00 yang meliputi 13 Program dan 77 kegiatan.

Tabel 9
Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Pendidikan
Di Kota Madiun Pada Tahun 2009-2010

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2009	Kinerja Tahun 2010
1	Perkembangan Sasaran Peningkatan Pemerataan Dan Perluasan Akses Pendidikan	APK PAUD	20.91%	25.65%
		APK TK	68.55%	70.70%
		APK SD/MI	107.11%	118.67%
		APM SD/MI	98.24%	108.56%
		APK SMP/MTs/Paket B	104.35%	117.61%
		APM SMP/MTs/Paket B	81.22%	92.41%
2	Perkembangan Sasaran Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan	Memiliki sekolah RSBI di SD/MI	0	0
		Memiliki sekolah RSBI di SMP/MTs	2	2
		APK Sekolah Menengah	146.75	161.61%
		Rasio Siswa SMK : SMA/MA	67:33	61:39
		Memiliki Sekolah RSBI SMA/MA/SMK	4	4
		Rasio Buku : Siswa	1:1	1:1
		Sarana Prasarana Sekolah memenuhi SNP	62%	67%
		75% peserta UN memiliki nilai rata-rata 6,00	100%	100%
		70 % guru berpendidikan S1	83.74%	92.90%
		40 % Guru, Pengawas bersertifikat	30.10%	49.95%
		akreditasi sekolah 100%	100%	100%
		Tingkat buta aksara diatas 44 tahun	0.40%	0.11%
3	Perkembangan Sasaran Penguatan Tata Kelola dan Pencitraan Publik	100 % sekolah semua jenjang melaksanakan MBS	100%	100%
		50 % Komite Sekolah berfungsi	80%	80%
		Dewan Pendidikan berfungsi dengan baik	baik	baik
		Pangkalan data dan informasi berbasis web	85%	88%

Sumber Data : Dinas Dikbudmudora Kota Madiun

2. Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan urusan kesehatan di Kota Madiun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Madiun dengan alokasi anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.38.946.891.000,00 dan terealisasi Rp.35.282.499.763,00 yang meliputi 15 Program dan 69 kegiatan.

Tabel 10
Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Kesehatan
di Kota Madiun Tahun 2009-2010

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2009	Kinerja Tahun 2010
1	Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH)	a. AHH Kota Madiun lebih tinggi dari propinsi	70,65	70,80

2	Meningkatnya kualitas penanganan KIBLA (Kesehatan Ibu, Balita dan Bayi baru lahir)	a. Menurunnya angka kematian ibu	75,87	74,16
		b. Menurunnya angka kematian bayi	18,59	12,61
		c. Menurunnya rasio balita gizi buruk	0,54%	0,42%
		d. Meningkatnya angka kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	92,59 %	92,59 %
3	Meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan	a. Rasio peserta askeskin terhadap jumlah penduduk miskin	100 %	100 %
		b. Meningkatnya IKM Dinas Kesehatan	78,00	79,62
		c. Rasio Tenaga kesehatan (medis) terhadap jumlah penduduk	35,19	35,99
4	Meningkatnya kualitas pencegahan, pemberantasan, dan penanganan penyakit	a. Menurunnya Angka kematian penderita DBD	0,01 %	0 %
		b. Meningkatnya cakupan penemuan penderita :		
		- Diare	45,67 %	124,05 %
		- Pneumonia	3,92 %	4,36 %
		- TB Paru	42,71 %	53,64 %
		- HIV	1,50 %	1,35 %
		- Acute Flacid Paralysis (AFP) rate	6,60	6,60
		a. Menurunnya angka kesakitan sesuai kasus:		
		- Diare	19,32	52,47
		- DBD	67,89	42,90
		- Kusta	1,98	2,47
		b. Meningkatnya penanganan penderita penyakit sesuai kasus :		
		- Diare	100 %	100 %
		- Kusta	100 %	100 %
- DBD	100 %	100 %		
- Pneumonia	100 %	100 %		
- HIV/AIDS	100 %	100 %		

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Madiun

3. Urusan Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup di Kota Madiun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun dengan alokasi anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.9.525.220.000,00 dan terealisasi Rp.8.888.388.968,00 yang meliputi 9 Program dan 37 kegiatan.

Tabel 11
Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup
Di Kota Madiun Tahun 2009-2010

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2009	Kinerja Tahun 2010
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan dan sampah kota	a. Cakupan wilayah penanganan sampah minimal mencakup 80% penduduk	90.61%	90.61%
		b. Diraihnya penghargaan adipura	Adipura ke 5	Adipura ke 6

2	Meningkatnya kualitas penataan Ruang dan Lingkungan hidup	a. Ketersediaan ruang terbuka hijau minimal 30% luas wilayah	10,97%	10,97%
		b. Tingkat pencemaran udara dan air lebih rendah dari baku mutu	Lebih rendah dari baku mutu	Lebih rendah dari baku mutu

Sumber Data: DKP dan Kantor LH Kota Madiun

4. Urusan Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum di Kota Madiun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun dengan alokasi anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.104.411.643.000,00 dan terealisasi Rp.88.258.736.978,00 yang meliputi 9 Program dan 20 kegiatan.

Tabel 12
Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum di Kota Madiun Tahun 2009-2010

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2009	Kinerja Tahun 2010
1	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	a. Rasio panjang jalan minimal 0,6 km/ 1.000 penduduk atau rasio luas jalan dengan luas wilayah 5% yang tersebar di seluruh bagian wilayah kota	5,23%	5,28%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan drainase dan pengendalian banjir	a. Tinggi genangan yang terjadi di bawah 30 cm dengan lama maksimal 2 jam	10 Jam	5 jam
		b. Frekuensi terjadinya banjir maksimal 2 kali setahun	6 kali	5 kali

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun

5. Urusan Tata Ruang

Penyelenggaraan urusan Tata Ruang di Kota Madiun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun dengan alokasi anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.450.000.000,00 dan terealisasi Rp.447.203.800,00 yang meliputi 2 Program dan 3 kegiatan.

Tabel 13
Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Tata Ruang di Kota Madiun Tahun 2009-2010

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2009	Kinerja Tahun 2010
1	Meningkatnya kualitas penataan Ruang	a. Terpasangnya dokumen/ informasi/ peta/ Rencana tata ruang wilayah di tempat-tempat umum yang mudah diakses	1 Lokasi (Bappeda)	1 Lokasi (Bappeda)
		b. Terkendalinya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	100%	100%

Sumber Data : Bappeda Kota Madiun

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan di Kota Madiun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun dengan alokasi anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.2.123.908.000,00 dan terealisasi Rp.2.079.009.205,00 yang meliputi 7 Program dan 25 kegiatan.

Tabel 14
Perkembangan Urusan Perencanaan Pembangunan
Di Kota Madiun Tahun 2009-2010

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2009	Kinerja Tahun 2010
1	Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Mekanisme perencanaan dan penganggaran dilaksanakan sesuai regulasi	Sesuai Aturan	Sesuai Aturan
2	Meningkatnya kualitas perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai dengan prioritas pembangunan	4 Dokumen	2 Dokumen

Sumber Data : Bappeda Kota Madiun

7. Urusan Perumahan

Penyelenggaraan urusan Perumahan di Kota Madiun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun dengan alokasi anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.2.069.064.000,00 dan terealisasi Rp.1.836.361.400,00 yang meliputi 2 Program dan 4 kegiatan.

Tabel 15
Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Perumahan
di Kota Madiun Tahun 2009-2010

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2009	Kinerja Tahun 2010
1	Meningkatnya kualitas pelayanan sanitasi dan air bersih	a. Tingkat penyediaan sarana sanitasi di atas 80% dari jumlah penduduk	99,66%	99,76%
		b. Minimal 55-75% penduduk terlayani air bersih	78,53%	79,44%

Sumber Data : Dinas PU Kota Madiun

8. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olah Raga di Kota Madiun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun dengan alokasi anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.1.154.073.000,00 dan terealisasi Rp.1.145.667.900,00 yang meliputi 3 Program dan 11 kegiatan.

Tabel 16
Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
di Kota Madiun Tahun 2009-2010

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2009	Kinerja Tahun 2010
1	Meningkatnya pembinaan generasi muda dan prestasi olah raga	a. Jumlah pembinaan generasi muda	4 Kegiatan	5 Kegiatan
		b. Jumlah prestasi olah raga	Tingkat Provinsi : 1 Medali Perak Dari Cabor Renang	Tingkat Nasional : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 Medali Emas dan 1 Perak dari Pencak Silat, ▪ 2 Perak dan 3 Perunggu dari Karate. Tingkat Provinsi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 emas, 7 perak, 3 perunggu dari Judo, ▪ 1 emas, 1 perak dari Renang, ▪ 1 perak dari catur, 1 perunggu dari tenis meja, ▪ 2 perunggu dari pencak silat, ▪ 1 emas, 1 perak, 4 perunggu dari Gulat, ▪ 1 emas, 4 perak, 7 perunggu dari karate, ▪ 2 perunggu dari bulu tangkis, ▪ 1 perunggu dari Tenis Lapangan, ▪ 1 emas dari Sepak Bola, ▪ 1 emas dan 2 perunggu dari Wushu.

Sumber Data : Dinas Dikbudmudora Kota Madiun

9. Urusan Penanaman Modal

Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal di Kota Madiun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Kota Madiun dengan alokasi anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.74.400.000,00 dan terealisasi Rp.73.727.800,00 yang meliputi 1 Program dan 1 kegiatan.

Tabel 17
Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal
Di Kota Madiun Tahun 2009-2010

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2009	Kinerja Tahun 2010
1	Meningkatnya jumlah investasi	Jumlah nilai investasi	Rp.271.532.253.877	Rp.313.282.723.877
		Jumlah ijin investasi yang dikeluarkan	232 Ijin	267 Ijin

Sumber Data : Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial

10. Urusan Koperasi dan UKM

Penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Madiun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun dengan alokasi

anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.294.575.000,00 dan terealisasi Rp.270.970.000,00 yang meliputi 4 Program dan 7 kegiatan.

Tabel 18
Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM
Di Kota Madiun Tahun 2009-2010

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2009	Kinerja Tahun 2010
1.	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	a. Jumlah UMKM sektor informal dan terlindungi keberlangsungannya	22.334 unit	22.790 unit
		b. Meningkatnya sentra UKM yang terfasilitasi	3 unit	3 unit
		c. Jumlah koperasi meningkat	280 unit	285 unit
2	Terbangunnya kesetaraan gender yang tergabung dlm kelompok/ Koperasi Wanita	a. Jumlah Koperasi Wanita	37 unit	37 unit
3.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui KUMKM	a. Jumlah aset/ omzet koperasi meningkat	109,9 M/ 138,3 M	156,5 M/ 205 M
		b. Terserapnya fasilitasi permodalan usaha yang disediakan pemerintah maupun BUMN meningkat	12.480 M	13,750 M

Sumber Data : Disperindagkopar Kota Madiun

11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Madiun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dengan alokasi anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.1.184.620.000,00 dan terealisasi Rp.1.151.427.400,00 yang meliputi 5 Program dan 12 kegiatan.

Tabel 19
Perkembangan penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
di Kota Madiun Tahun 2009-2010

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2009	Kinerja Tahun 2010
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya IKM terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil	74,66	75,15
2	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan berupa :		
		a. KK	60.987 KK	62.399 KK
		b. KTP	134.631 Orang	143.498 Orang
		c. Akte Kelahiran	149.357 Orang	154.096 Orang

Sumber Data : Dinas Dukcapil Kota Madiun

12. Urusan Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan di Kota Madiun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun dengan alokasi anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.702.656.000,00 dan terealisasi Rp.701.526.000,00 yang meliputi 3 Program dan 7 kegiatan.

Tabel 20
Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan di Kota Madiun Tahun 2009-2010

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2009	Kinerja Tahun 2010
1	Menurunnya jumlah pengangguran dan kemiskinan	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	11,27%	9,52%
		b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	53,59%	53,60%
		c. Menurunnya tingkat kemiskinan (%)	7,94%	7,89%

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun

13. Urusan Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan di Kota Madiun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan dan Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Kota Madiun dengan alokasi anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.504.610.000,00 dan terealisasi Rp.489.005.800,00 yang meliputi 1 Program dan 2 kegiatan.

Tabel 21
Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan di Kota Madiun Tahun 2009-2010

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2009	Kinerja Tahun 2010
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	a. Adanya regulasi Ketahanan pangan	Tidak ada	Ada
		b. Jumlah ketersediaan bahan pangan utama (Beras)	9.410.000 kg	8.988.005 kg
		c. Menurunnya Jumlah RTS Penerima Raskin	6.058 RTS	5.490 RTS

Sumber Data : BPM, KB dan KP dan Bagian Adm.Pereksos Kota Madiun

14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Madiun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun dengan alokasi anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran

2010 sebesar Rp.420.000.000,00 dan terealisasi Rp.341.971.750,00 yang meliputi 3 Program dan 4 kegiatan.

Tabel 22
Perkembangan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Madiun Tahun 2009-2010

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2009	Kinerja Tahun 2010
1	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	a. Jumlah Perempuan dalam organisasi dan lembaga pemerintahan	2796	2899
			GOW : 34	GOW : 34
		b. Jumlah program pemerintah yang melibatkan perempuan dan organisasi perempuan	3 Program	3 Program
2	Meningkatnya perlindungan hak-hak anak dan perempuan	a. Jumlah penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan	24 Kasus	21 Kasus
		b. Jumlah penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (KDRT)	23 Kasus	21 Kasus

Sumber Data : BPM, KB dan KP Kota Madiun

15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Madiun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun dengan alokasi anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.1.002.126.000,00 dan terealisasi Rp.951.823.100,00 yang meliputi 5 Program dan 7 kegiatan.

Tabel 23
Perkembangan Penyelenggaraan Urusan KB dan KS di Kota Madiun Tahun 2009-2010

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2009	Kinerja Tahun 2010
1	Meningkatnya kualitas penanganan KB dan KS	a. Angka Kepesertaan KB	71,03%	75,07%
		b. % Keluarga Pra KS dan KS 1	17,23%	17,86%
		c. % Keluarga Sejahtera II –III Plus	82,76%	82,09%

Sumber Data : BPM, KB dan KP Kota Madiun

16. Urusan Perhubungan

Penyelenggaraan urusan Perhubungan di Kota Madiun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kota Madiun dengan alokasi anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.1.750.942.000,00 dan terealisasi Rp.1.639.108.575,00 yang meliputi 7 Program dan 17 kegiatan.

Tabel 24
Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan
di Kota Madiun Tahun 2009-2010

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2009	Kinerja Tahun 2010
1	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	a. Cakupan rute angkutan umum tersebar di seluruh wilayah bagian kota	83%	83%
		b. Diraihnya WTN	Piala	Dipertahankan

Sumber Data : Dishubkominfo Kota Madiun

17. Urusan Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Madiun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Bagian Humas dan Protokol Kota Madiun dengan alokasi anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.580.000.000,00 dan terealisasi Rp.575.121.800,00 yang meliputi 1 Program dan 7 kegiatan.

Tabel 25
Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika
di Kota Madiun Tahun 2009-2010

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2009	Kinerja Tahun 2010
1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan	Meningkatnya IKM	75,5	77,74
2	Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa	Jumlah Media Komunikasi, Informasi dan Massa yang dimiliki oleh Pemerintah daerah.	8 Media	8 Media

Sumber Data : Bagian Humas Setda Kota Madiun

18. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kota Madiun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun dengan alokasi anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.2.067.349.000,00 dan terealisasi Rp.1.954.192.557,00 yang meliputi 7 Program dan 18 kegiatan.

Tabel 26
Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
di Kota Madiun Tahun 2009-2010

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2009	Kinerja Tahun 2010
1	Meningkatnya stabilitas daerah	a. Penyelesaian konflik di daerah	100%	100%
2	Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan	a. Tingkat pelanggaran perda berkurang	43,76%	35%
3	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	a. Jumlah friksi dan konflik antar agama dan ras	Tidak Ada	Tidak ada
		b. Jumlah kegiatan bantuan sosial keagamaan yang tidak membedakan ras dan agama	49 Kegiatan	54 Kegiatan

Sumber Data : Bakesbangpolinmas dan Satpol PP Kota Madiun

19. Urusan Otonomi Daerah

Penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Kota Madiun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bagian-Bagian di Sekretariat Daerah, Kecamatan-Kecamatan, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Madiun dengan alokasi anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.37.788.996.000,00 dan terealisasi Rp.33.294.963.519,00 yang meliputi 20 Program dan 141 kegiatan.

Tabel 27
Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah
di Kota Madiun Tahun 2009-2010

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2009	Kinerja Tahun 2010
1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan hasil-hasil pembangunan	a. Evaluasi kinerja pemerintah kota dan instansi pemerintah diselesaikan tepat pada waktunya	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		b. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	75,23	76,54
2	Meningkatnya kegiatan kerjasama dalam pembangunan daerah	a. Jumlah MOU kerjasama	15 MOU	18 MOU
		b. Frekuensi diadakan kegiatan event nasional dan regional meningkat	2 kali	4 kali

Sumber Data : Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kota Madiun

20. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Madiun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pemberdayaan

Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan dan Kecamatan-Kecamatan Kota Madiun dengan alokasi anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.664.898.000,00 dan terealisasi Rp.638.129.325,00 yang meliputi 5 Program dan 15 kegiatan.

Tabel 28
Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Madiun Tahun 2009-2010

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2009	Kinerja Tahun 2010
1	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	a. Jumlah LPMK yang aktif	27 Lembaga	27 Lembaga
		b. Jumlah Lembaga Ekonomi Lokal yang sehat	18 Lembaga	20 Lembaga
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah swadaya murni	Rp.2.258.852.722	Rp.3.375.788.507

Sumber Data : BPM, KB dan KP Kota Madiun

21. Urusan Sosial

Penyelenggaraan urusan Sosial di Kota Madiun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun dengan alokasi anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.595.213.000,00 dan terealisasi Rp.576.944.570,00 yang meliputi 6 Program dan 13 kegiatan.

Tabel 29
Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Sosial Kota Madiun Tahun 2009-2010

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2009	Kinerja Tahun 2010
1	Meningkatnya perlindungan terhadap PMKS	a. % penanganan orang terlintar meningkat	108%	108,53 %
		b. % pelayananan penyandang cacat meningkat	11,52%	11,93%
		c. % penanganan ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku meningkat	55,56%	62,06%

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun

22. Urusan Budaya

Penyelenggaraan urusan Budaya di Kota Madiun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Bagian Umum, Bagian Humas dan Protokol dan Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Kota Madiun dengan alokasi anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.1.547.577.000,00 dan terealisasi Rp.1.528.119.162,00 yang meliputi 2 Program dan 13 kegiatan.

Tabel 30
Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Budaya di Kota Madiun Tahun 2009-2010

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2009	Kinerja Tahun 2010
1	Meningkatnya kualitas budaya lokal di tingkat nasional dan internasional	a. Jumlah sarana dan prasarana wahana pengembangan seni dan budaya tingkat kota	1	2
		b. Jumlah fasilitasi yang mencakup pembinaan dan penyelenggaraan event	14	22
		c. Jumlah sanggar dan tempat latihan kesenian dan budaya	1	1
		d. Keikutsertaan dan prestasi dalam event regional dan nasional	3	5
2	Meningkatnya jumlah kegiatan budaya sebagai pendorong kegiatan pariwisata	a. Jumlah event/ kegiatan budaya	5	8

Sumber Data: Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda dan OR

23. Urusan Statistik

Penyelenggaraan urusan Statistik di Kota Madiun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kota Madiun dengan alokasi anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.410.000.000,00 dan terealisasi Rp.403.387.000,00 yang meliputi 1 Program dan 5 kegiatan.

Tabel 31
Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Statistik Di Kota Madiun Tahun 2009-2010

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2009	Kinerja Tahun 2010
1	Meningkatnya kualitas perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai dengan prioritas pembangunan	5 dokumen	6 dokumen

Sumber Data : Bappeda Kota Madiun

24. Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan urusan Kearsipan di Kota Madiun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Madiun dengan alokasi anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.75.000.000,00 dan terealisasi Rp.72.964.800,00 yang meliputi 2 Program dan 2 kegiatan.

Tabel 32
Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Kearsipan di Kota Madiun Tahun 2009-2010

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2009	Kinerja Tahun 2010
1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan	Meningkatnya IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	75,25	78,50
2	Pengembangan pengelolaan kearsipan	Meningkat jumlah SKPD yang telah menerapkan pengelolaan kearsipan secara baku	34 SKPD	40 SKPD

Sumber Data : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

25. Urusan Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan Perpustakaan di Kota Madiun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Madiun dengan alokasi anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.203.735.000,00 dan terealisasi Rp.202.097.200,00 yang meliputi 3 Program dan 6 kegiatan.

Tabel 33
Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan di Kota Madiun Tahun 2009-2010

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2009	Kinerja Tahun 2010
1	Meningkatnya minat baca masyarakat	a. Jumlah pengunjung perpustakaan daerah	21.750	21.770
		b. Jumlah Koleksi judul buku di perpustakaan daerah	20.219	20.600

Sumber Data : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

B. URUSAN PILIHAN

1. Urusan Pertanian

Penyelenggaraan urusan Pertanian di Kota Madiun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kota Madiun dengan alokasi anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.357.381.000,00 dan terealisasi Rp.355.400.550,00 yang meliputi 8 Program dan 11 kegiatan.

Tabel 34
Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Pertanian di Kota Madiun Tahun 2009-2010

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2009	Kinerja Tahun 2010
1	Meningkatnya produksi hasil pertanian	a. Produksi padi	6,8 Ton/Ha	6,5 Ton/Ha
2	Meningkatnya produksi hasil peternakan	a. Produksi Ternak	372.399	378.897

Sumber Data : Dinas Pertanian Kota Madiun

2. Urusan Perikanan

Penyelenggaraan urusan Perikanan di Kota Madiun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kota Madiun dengan alokasi anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.1.506.434.000,00 dan terealisasi Rp.1.238.942.300,00 yang meliputi 1 Program dan 1 kegiatan.

Tabel 35
Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Perikanan
di Kota Madiun Tahun 2009-2010

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2009	Kinerja Tahun 2010
1	Meningkatnya hasil produksi perikanan	a. Jumlah produksi perikanan	62.330 Kg	117.158 Kg

Sumber Data : Dinas Pertanian Kota Madiun

3. Urusan Perindustrian

Penyelenggaraan urusan Perindustrian di Kota Madiun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun dengan alokasi anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.405.427.000,00 dan terealisasi Rp.374.390.057,00 yang meliputi 5 Program dan 8 kegiatan.

Tabel 36
Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Perindustrian
di Kota Madiun Tahun 2009-2010

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2009	Kinerja Tahun 2010
1	Meningkatnya kontribusi sektor industri	Kontribusi sektor industri	25,15%	25,01%

Sumber Data : Disperindagkopar Kota Madiun

4. Urusan Perdagangan

Penyelenggaraan urusan Perdagangan di Kota Madiun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun dengan alokasi anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.1.279.275.000,00 dan terealisasi Rp.1.176.215.750,00 yang meliputi 8 Program dan 15 kegiatan.

Tabel 37
Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Perdagangan
di Kota Madiun Tahun 2009 – 2010

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2009	Kinerja Tahun 2010
1.	Meningkatnya kontribusi sektor	a. Kontribusi sektor perdagangan	13,30 %	13,54 %

	perdagangan	b. Omset pasar regional meningkat	Rp.29.670.447.648	Rp.33.767.500.000
2	Meningkatnya fasilitas pendukung kegiatan sektor informal	a. Jumlah relokasi / lokasi penataan Pedagang Kaki Lima	1 Lokasi (Aloon-Aloon Kota Madiun)	1 Lokasi (Aloon-Aloon Kota Madiun)

Sumber Data : Disperindagkopar dan Dinas Pasar Kota Madiun

5. Urusan Pariwisata

Penyelenggaraan urusan Pariwisata di Kota Madiun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun dengan alokasi anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.160.000.000,00 dan terealisasi Rp.140.163.710,00 yang meliputi 2 Program dan 3 kegiatan.

Tabel 38
Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Pariwisata
Di Kota Madiun Tahun 2009-2010

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2009	Kinerja Tahun 2010
1	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	a. Jumlah Kunjungan Wisata	148.535 Orang	126.149 Orang
		b. Kontribusi sektor pariwisata	19,20%	19,12%

Sumber Data : Disperindagkopar Kota Madiun

V. PENGHARGAAN YANG DIRAIH PADA TAHUN 2010

BIDANG	PENGHARGAAN YANG DIRAIH
1. Pendidikan	a. Medali Emas Lomba Karya Ilmiah Tingkat Internasional; b. Nilai Ujian Nasional Tertinggi untuk SMK Tingkat Provinsi Jawa Timur
2. Lingkungan Hidup	c. Piala Adipura d. Juara I Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (SMPN 7 Madiun) e. Calon Sekolah Adi Wiyata
3. Perhubungan	Piala Wahana Tata Nugraha (WTN)
4. Ketenagakerjaan	Zero Accident Award
5. Penanaman Modal	Investment Award
6. Pemberdayaan Perempuan	Juara I Lomba P2WKSS Provinsi Jawa Timur
7. Pemberdayaan Masyarakat	Juara III Lomba Kelurahan Berhasil Provinsi Jawa Timur
8. Kepemudaan dan Olah Raga	Juara I Piala KONI Jawa Timur Cabang Olah Raga Sepak Bola
9. Perpustakaan	Juara I Lomba Minat Baca Provinsi Jawa Timur

VI. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

URUSAN	PELAKSANAAN PROGRAM
1. Urusan Pendidikan	a. Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat, yaitu : 1) Blockgrant Peningkatan Mutu Taman Kanak-Kanak; 2) Blockgrant Peningkatan Mutu Taman Kanak-Kanak

	<ul style="list-style-type: none"> Pembina; 3) Pembangunan RBL (Laboratorium IPA); 4) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); 5) BKSM SLTA. <p>b. Tugas Pembantuan dari Pemerintah Propinsi, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Dana Bosda Madin dan Guru Swasta/ BPP-MDGS (Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta); 2) BKSM SLTA.
2. Urusan Kesehatan	<p>a. Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan investasi gizi buruk di tingkat puskesmas 2) Kegiatan pemetaan PSG dan kaderisasi 3) Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan ibu 4) Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan anak 5) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 6) Kegiatan riset kesehatan dasar 7) Kegiatan riset sasaran Jamkesmas 8) Kegiatan Jamkesmas. <p>b. Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan pengumpulan data GAKY melalui pengambilan sampel urin ibu hamil 2) Program Kesehatan Ibu Tahap I : Kegiatan awareness & screening dan Kegiatan Cryptherapy (Gas N₂O) 3) Program Kesehatan Ibu Tahap II : Kegiatan penyuluhan, Kegiatan screening dan Kegiatan Cryptherapy (Gas N₂O) 4) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar 5) Kegiatan Immunization Service Support 6) Kegiatan bintek dan pertemuan teknis petugas 7) Kegiatan validasi data, supervisi, penaksanaan specimen TB, kesembuhan dan konvensi 8) Kegiatan peningkatan pembiayaan jaminan kesehatan 9) Kegiatan pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat desa siaga 10) Kegiatan pendampingan desa di tingkat kecamatan 11) Kegiatan monev dan bintek terpadu pengembangan desa siaga 12) Kegiatan pelayanan jarum suntik steril bagi Penasun MII sistem kesehatan masyarakat.
3. Urusan Koperasi	<p>a. Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Administrasi Kegiatan 2) Kegiatan penyusunan program 3) Kegiatan kelembagaan koperasi 4) Kegiatan fasilitas pembiayaan dan usaha SP 5) Kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah 6) Kegiatan usaha koperasi. <p>b. Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan penyelenggaraan promosi produk UMKM 2) Kegiatan Fasilitas Pengembangan Koperasi dan UMKM (BOP) 3) Kegiatan Fasilitas Pengembangan Koperasi dan UMKM (BOP) 4) BOP kegiatan pembentukan koperasi wanita 5) Kegiatan peningkatan dan pengembangan jaringan usaha kerjasama koperasi 6) Kegiatan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi.
4. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat yaitu Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan
5. Urusan Ketenagakerjaan	<p>Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan penyelenggaraan program pelatihan kerja berbasis masyarakat 2) Kegiatan konsolidasi program-program perluasan kesempatan kerja 3) Kegiatan fasilitas pendukung pasar kerja melalui penguatan kelembagaan, peningkatan informasi, penyelenggaraan bursa kerja 4) Kegiatan penugasan Sarjana dan Pelaporan Bursa Kerja On-

	Line (BKOL).
6. Urusan Ketahanan Pangan	Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat yaitu Kegiatan pengembangan desa mandiri pangan.
7. Urusan Keluarga Berencana	Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi, yaitu: 1) Program penerapan pemerintahan yang baik 2) Program penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas 3) Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga 4) Program Keluarga Berencana 5) Program KRR.
8. Urusan Perpustakaan	Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat, yaitu Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Umum Kabupaten/ Kota Tahap II.

VI. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BIDANG	PELAKSANAAN PROGRAM
1. Kerjasama Antar Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan Kabupaten/ Kota se Jawa Timur; b. Penataan Batas Wilayah dengan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan; c. Pengendalian Banjir dengan Kabupaten Madiun; d. Peringatan HUT RI dengan Kabupaten Madiun; e. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Eksekutif dari Luar Daerah diantaranya Kota Tasikmalaya, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, dan Kota Pasuruan; f. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Legislatif dari Luar Daerah diantaranya : Komisi I DPRD Kabupaten Tulung Agung, Komisi II DPRD Kota Salatiga, Pansus Pasaraya II DPRD Kota Salatiga, DPRD Kabupaten Sidoarjo, Pansus SOTK DPRD Kota Salatiga, Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro dan Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Bandar Lampung; g. Kunjungan Kerja Pejabat Eksekutif ke Luar Daerah dalam rangka study banding kawasan tanpa rokok (KTR) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; h. Kunjungan Kerja Pejabat Legislatif ke Luar Daerah diantaranya Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Pasuruan, Kota dan Kabupaten Pontianak, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat; i. Dengan Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Timur dalam rangka Jambore dan HUT Satpol PP.
2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerjasama dengan PT. SRI TANAYA MEGA TAMA tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; b. Kerjasama dengan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Kota Madiun tentang Bantuan Hibah kepada PSSI Kota Madiun; c. Kerjasama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tentang Bantuan Hibah kepada KONI Kota Madiun; d. Kerjasama dengan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) tentang Bantuan Hibah kepada KORPRI Kota Madiun; e. Kerjasama dengan Kwartir Cabang (KWARCAB) Pramuka Kota Madiun tentang Bantuan Hibah kepada Kwarcab Pramuka Kota Madiun; f. Kerjasama dengan Badan Narkotika Kota (BNK) tentang Bantuan Hibah kepada BNK Kota Madiun; g. Kerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Madiun tentang Bantuan Hibah kepada PMI Kota Madiun; h. Kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat tentang Peningkatan Kualitas Perumahan, Pembangunan Baru Prasarana Sarana dan Utilitas. i. Kerjasama dengan PT. Askes tentang Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Daerah (JAMKESMASDA) Kota Madiun;

	<ul style="list-style-type: none"> j. Kerjasama dengan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) tentang Bantuan Hibah kepada LPTQ Kota Madiun; k. Kerjasama dengan Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) tentang Bantuan Hibah kepada FKUB Kota Madiun; l. Kerjasama dengan PT. Indraco tentang Pembangunan dan pengelolaan kawasan hiburan/ wisata, perdagangan dan hotel di Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan sistem bangunan guna serah; m. Kerjasama dengan PT. Pos Indonesia tentang Penanganan Pengiriman Berkas CPNS Pemerintah Kota Madiun Tahun 2010; n. Kerjasama dengan LPPM ITS tentang perencanaan pembangunan di Kota Madiun; o. Kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan tata kelola perusahaan yang baik di Kota Madiun. p. Kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementrian Perhubungan tentang Pembangunan Lembaga Pendidikan Perkeretaapian. q. Kerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Provinsi Jawa Timur tentang Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angk. XXI tahun 2010; r. Kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Bandung (ITB) tentang Pengadaan Sistem Penerimaan CPNSD Formasi Umum Tahun 2010.
3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal	<ul style="list-style-type: none"> a. dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam Penyelenggaraan Diklat PPNS Tahun 2010 b. dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Pengumpulan dan Penyusunan Data Statistik c. dengan Polres Madiun Kota, DENPOM V/II Madiun, UPT LLAJ Madiun, UPT Bina Marga Madiun, UPT Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Madiun Kota, PT. Jasa Raharja Perwakilan Madiun dan Organda Kota Madiun dalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) d. dengan Pengadilan Negeri Kota Madiun, Pengadilan Agama Polresta, Kejaksaan Negeri dan Badan Pertanahan dalam Penyuluhan Hukum Terpadu dan Pembinaan Kadarkum.
4. Pencegahan dan penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Antisipasi dalam menghadapi banjir adalah pembangunan pintu air A. Yani, service mesin pompa, dan pemeliharaan pintu air se Wilayah Kota Madiun. b. mengadakan Buffen Stock berupa makanan dan kebutuhan sandang serta beras dan logistik lainnya.
5. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban.

Madiun, Maret 2011

WALIKOTA MADIUN



H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM

Segala saran, kritik dan masukan tentang Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2010 dari masyarakat dapat ditunggu selama 30 hari dan dapat disampaikan ke Pemerintah Kota Madiun melalui :

1. *Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Madiun
Jalan Pahlawan No. 37 Madiun*
2. *Email : ILPPD@madiunkota.net*

